

BAB I

KAJIAN DAN ANALISIS SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA

A. WAWASAN KEINDONESIAAN

Sistem Komunikasi Indonesia dikembangkan sebagai sebuah materi dalam upaya “pengindonesiaan” ilmu komunikasi. Dalam rangkaian kata “Sistem Komunikasi Indonesia”, kata Indonesia memberikan makna karakteristik esensi sistem komunikasi yang berkaitan dengan filsafat hidup, ideologi, dan konstitusi Negara Republik Indonesia. Hal ini berbeda secara substansial dengan rangkaian kata “Sistem Komunikasi di Indonesia” yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah tempat terjadinya sistem komunikasi.

1. Kajian Pengindonesiaan

Pengindonesiaan disebut sebagai pribumisasi ilmu-ilmu sosial yang dikenal dalam kajian historis dengan sebutan indonesiasentris atau dalam studi kemasyarakatan dikenal dengan sebutan wawasan keindonesiaan.

Sistem Komunikasi Indonesia dapat diartikan sebagai penerapan wawasan keindonesiaan dalam komunikasi. Wawasan keindonesiaan merupakan cara pandang dan kemampuan dalam menganalisis kehidupan sosial politik yang mencakup komunikasi bangsa Indonesia berdasarkan falsafah hidup, gagasan vital, dan kondisi objektif masyarakat Indonesia.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan merupakan negara kepulauan yang masyarakatnya tidak hanya bersifat majemuk dan sedang membangun, tetapi juga memiliki falsafah hidup dan gagasan vital yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Ilmu komunikasi yang dikembangkan di Indonesia diharapkan tidak terasing dan tidak terlepas dari matrik sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri.

Wawasan keindonesiaan bersumber dari pemahaman bahwa ilmu-ilmu sosial bersifat “tidak bebas nilai” karena setiap masyarakat memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh banyak

faktor, terutama faktor sejarah dan kultural. Sistem sosial adalah sistem yang terbuka, sehingga banyak variabel yang harus diperhatikan dan diperhitungkan dalam melakukan analisis ilmiah tentang fenomena sosial yang muncul.

Pandangan bahwa ilmu-ilmu sosial bersifat tidak bebas nilai sering disebut sebagai aliran kultural dalam ilmu-ilmu sosial. Sebaliknya terdapat juga aliran universal yang memandang bahwa ilmu-ilmu sosial bersifat “bebas nilai”, yang bermakna bahwa konsep ilmu-ilmu sosial itu bersifat universal dan dapat diterapkan di setiap negara yang ada di dunia. Namun berdasarkan perkembangan konsep universal banyak variabel lokal yang sangat berpengaruh, tetapi kurang diperhatikan. Dengan demikian universalitas dalam ilmu-ilmu sosial semakin diragukan terutama dalam penerapannya. Karena itu ilmu-ilmu sosial perlu di Indonesiakan atau dipribumikan di Indonesia.

Ciri-ciri variabel lokal seperti sejarah, kultur (kebudayaan), sosial, politik, dan ekonomi tidak dapat diabaikan begitu saja. Hal tersebut membentuk budaya komunikasi, budaya politik, budaya ekonomi, dan budaya hukum sebagai jati diri atau identitas suatu bangsa yang tercermin juga dalam bentuk kebebasan informasi atau *freedom of information* yang mencakup kebebasan pers (*freedom of the pers*) dan kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) melalui media massa.

Dengan menyaring ilmu-ilmu sosial (sosiologi, ilmu politik, ilmu pemerintahan, antropologi, dan ilmu komunikasi) yang berasal dari luar serta menyesuaikan dengan matriks sosial budaya Indonesia, ilmu komunikasi yang berasal dari luar itu akan bersifat fungsional dalam aplikasinya. Komunikasi sebagai integrator sosial atau perekat hidup bersama betul-betul terwujud, tidak sebaliknya menimbulkan konflik dan ketegangan sosial.

Penggunaan wawasan keindonesiaan akan menghindarkan seseorang dari sifat taklid terhadap wawasan yang berasal dari bangsa asing, tetapi sebaliknya akan bersifat kritis terhadap berbagai teori ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan oleh pakar dari Amerika atau Eropa Barat. Mereka pada umumnya mengembangkan teori ilmu-ilmu sosial sesuai dengan masyarakat

yang liberal-kapitalis yang belum tentu relevan dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia yang majemuk, kolektif, religius, kerakyatan, serta ingin mewujudkan keadilan sosial.

2. Pendekatan Multidisipliner

Dalam kajian Sistem Komunikasi Indonesia, hampir semua disiplin ilmu-ilmu sosial tersentuh. Filsafat, etika dan sejarah tidak bisa ditinggalkan. Ilmu Komunikasi, ilmu politik, ilmu hukum, Ilmu Ekonomi, sosiologi, antropologi, filsafat, etika, dan sejarah bercampur atau berpadu secara integral menjadi satu dalam sistem komunikasi Indonesia. Dengan demikian ilmu-ilmu sosial tidak lagi selalu harus dibelah secara vertikal sebagai sebuah disiplin ilmu, tetapi dapat juga dipotong secara horizontal melalui pendekatan multidisipliner atau Pendekatan terpadu.

Berdasarkan hal tersebut, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa Sistem Komunikasi Indonesia sebagai bentuk penerapan wawasan keindonesiaan dalam komunikasi manusia, adalah bagian dari Sistem Kenegaraan Indonesia yang terbentuk secara formal berdasarkan konstitusi dan undang-undang.

3. Kemerdekaan Informasi Publik

secara formal komunikasi manusia di Indonesia ditemukan sistemnya dalam sistem kenegaraan Indonesia atau sistem nasional melalui undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 28 disebutkan Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Bahkan dalam amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002 diakui adanya hak berkomunikasi sebagai hak asasi manusia atau HAM Indonesia. pasal 28F dirumuskan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Masalah informasi dan kebebasan mengeluarkan pikiran, pada umumnya dijadikan sebagai ukuran dalam membuat tipologi tentang rezim suatu negara terutama yang berkaitan dengan

tipologi negara-negara yang demokratis dan negara-negara yang otoriter atau yang tidak demokratis.

Pertanyaan yang muncul kaitan dengan informasi publik bagi para ilmuwan komunikasi, biasanya seputar Bagaimana asas kebebasan Informasi Publik dan implementasinya, bagaimana Informasi Publik itu diproduksi dan didistribusikan, serta Bagaimana hubungan lembaga informasi publik dengan pemerintah dan masyarakat di Indonesia. Semuanya itu dicakup dalam kajian tentang Sistem Komunikasi Indonesia dalam kaitannya dengan Sistem Kenegaraan Indonesia dan Sistem Nasional Indonesia.

B. ASAS, DEFINISI, DAN LINGKUP KAJIAN

Kajian tentang sistem komunikasi Indonesia sebagai penerapan wawasan keindonesiaan dalam komunikasi dengan titik sentral kajiannya pada Informasi Publik, akan terkait dan terwujud dalam bentuk organisasi atau lembaga dengan batas-batas yang jelas.

1. Asas Kebebasan dan Tanggung Jawab

Dalam Sistem Kenegaraan Indonesia, hubungan struktural dan hubungan fungsional antara sistem dengan subsistemnya dan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersumber dari filsafat dan dasar negara Pancasila serta konstitusi Indonesia (UUD 1945). Setiap sistem memiliki struktur dan fungsi serta berada dalam organisasi hierarki yang terdiri atas suprasistem, sistem, dan subsistem.

Sistem perfilman Indonesia yang diatur oleh undang-undang yang lahir pada awal 1964 adalah tentang pembinaan perfilman, dua tahun berselang lahir sistem pers Indonesia yang dikenal dengan Sistem Pers Pancasila (1966), kemudian disusul dengan lahirnya undang-undang perfilman (1992) sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, kemudian pada tahun 1997 hadir juga Sistem Penyiaran Indonesia. Dengan demikian Sistem Komunikasi Indonesia merupakan himpunan dari sistem Pers, sistem penyiaran, dan sistem perfilman yang semuanya bersumber pada titik sentral informasi publik.

Asas tentang kebebasan dan tanggung jawab yang seimbang dalam konsep kebebasan informasi merupakan salah satu komponen penting sebagai ciri khas Sistem Komunikasi Indonesia. Hal ini disebabkan karena asas kebebasan dan tanggung jawab yang seimbang itu merupakan implementasi dari prinsip kerakyatan atau kedaulatan rakyat yang berdasarkan filsafat dasar bangsa Indonesia terutama yang memadukan antara kolektivisme dan individualisme.

2. Definisi dan Batasan Kajian

Sistem Komunikasi Indonesia dapat diartikan sebagai bagian sistem kenegaraan Indonesia dengan meletakkan informasi publik yang mencakup kebebasan dan tanggung jawab yang seimbang sebagai pusat kajiannya. Dengan demikian dapat dibuat definisi yaitu Sistem Komunikasi Indonesia adalah subsistem dari sistem kenegaraan Indonesia dalam bentuk tatanan hubungan manusia Indonesia melalui informasi publik yang mencakup kebebasan dan tanggung jawab yang seimbang.

Sistem Komunikasi Indonesia dapat juga diartikan sebagai penerapan wawasan keindonesiaan dalam komunikasi, dan disebut juga sebagai himpunan beberapa subsistem yang memiliki sistem sendiri seperti Sistem Pers Indonesia, Sistem Perfilman Indonesia dan Sistem Penyiaran Indonesia.

Perlu ditegaskan bahwa kajian tentang Sistem Komunikasi Indonesia akan lebih banyak fokus kepada dimensi fungsi kenegaraan atau sosial politik komunikasi sebagai perekat hidup bersama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara otomatis perhatian akan dipusatkan kepada komunikasi publik yang mencakup komunikasi massa, komunikasi sosial, dan *public speaking* sehingga tidak semua segi komunikasi mendapat pembahasan.

3. Lingkup dan Dimensi Kajian

Kajian tentang Sistem Komunikasi Indonesia juga mencakup Pancasila sebagai paham atau ideologi resmi negara (Pancasilaisme) yang berbeda dan berkompetisi dengan liberalisme, otoritarianisme, dan komunisme dalam kaitannya

dengan kebebasan informasi sebagai bentuk hak asasi manusia yang berkembang di dunia.

Sistem Komunikasi Indonesia juga melingkupi kajian tentang fungsi dan pengawasan serta pemilihan media massa dan media sosial yang berbeda-beda di berbagai negara sesuai dengan filsafat politik atau Ideologi dan sistem politik dan sistem ekonomi masing-masing negara. Hal ini akan melahirkan kajian tentang ragam hubungan media massa dengan pemerintah dan masyarakat yang kemudian berkembang menjadi teori pers atau teori media massa. Sistem Komunikasi Indonesia juga melingkupi karakteristik dan identitas lembaga penerbitan pers, lembaga penyiaran, dan perfilman sebagai subsistem yang telah menemukan Sistemnya di Indonesia.

Akhirnya perkembangan media sosial (internet) yang telah melahirkan jurnalistik internet atau *dotcom journalism* di dunia maya (*cyberspace*) dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi informasi, perlu juga dikaji dalam memperkaya studi tentang Sistem Komunikasi Indonesia. Media sosial telah menunjukkan fungsi dan perannya bukan saja dalam bidang sosial melainkan juga dalam bidang politik.

C. ANALISIS KELEMBAGAAN

Dalam Sistem Komunikasi Indonesia dengan menggunakan pendekatan sistem dapat diketahui bahwa setiap sistem perlu mengandung hubungan struktural dan hubungan fungsional, sehingga tercipta hubungan antar lembaga. Dalam sistem politik misalnya, yang tercipta adalah hubungan lembaga-lembaga yang disebut struktur yang terdiri atas aspek infrastruktur yang ada dalam masyarakat (partai, ormas, media massa, dan kelompok kepentingan) serta aspek suprastruktur yang ada dalam pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Dalam Sistem Komunikasi Indonesia harus tercipta hubungan antar lembaga, sehingga analisis kelembagaan komunikasi publik dan informasi publik sangat diperlukan. Komunikasi publik dan informasi publik itu terlembagakan terutama dalam bentuk asosiasi penerbitan pers, perfilman, dan lembaga penyiaran. Dengan demikian diperlukan analisis kelembagaan.